

Proxy War Di Ethiopia-Tigray: Analisis Dampak Keterlibatan Peran Aktor Eksternal Terhadap Upaya Resolusi Konflik Oleh Uni Afrika

Indi Ratugenuita¹, Prilla Marsingga²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.

Email: 2310631260018@student.unsika.ac.id¹⁾ prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id²⁾

ABSTRACT

The Ethiopia-Tigray conflict is a complex armed struggle in Africa, exacerbated by the involvement of external actors, making it part of a proxy war. Eritrea supports the Ethiopian government against the TPLF, while the United Arab Emirates (UAE), Turkey, and Iran provide military assistance, prolonging the conflict and hindering resolution efforts by the African Union (AU). This study analyzes the AU's role in addressing the Ethiopia-Tigray conflict and the impact of the proxy war that complicates its dynamics. Using a qualitative descriptive-analytical approach, the study finds that the AU remains focused on peacekeeping, which primarily aims to stop violence without addressing the root causes of the conflict, such as political and economic inequalities. To achieve sustainable peace, the AU must shift towards peacebuilding, including national reconciliation, power decentralization, transitional justice, and post-conflict economic recovery. Beyond its military and political impacts, this proxy war has also led to a severe humanitarian crisis due to economic blockades and restricted access to humanitarian aid. Therefore, a long-term solution requires stronger diplomatic pressure on external actors and structural reforms in Ethiopia to ensure a fair and inclusive distribution of power. Without structural reforms and international commitment, the conflict risks recurring and threatening regional stability.

Keywords: Ethiopia-Tigray, Proxy War, African Union

ABSTRAK

Konflik Ethiopia-Tigray merupakan konflik bersenjata kompleks di Afrika yang diperburuk oleh keterlibatan aktor eksternal, menjadikannya bagian dari perang proxy. Eritrea mendukung pemerintah Ethiopia melawan TPLF, sementara Uni Emirat Arab (UEA), Turki, dan Iran memberikan bantuan militer yang memperpanjang konflik dan menghambat upaya resolusi oleh Uni Afrika (AU). Penelitian ini menganalisis peran AU dalam menangani konflik Ethiopia-Tigray serta dampak perang proxy yang memperumit dinamika konflik. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa AU masih berfokus pada peacekeeping, yang hanya menargetkan penghentian kekerasan tanpa mengatasi akar penyebab konflik, seperti ketimpangan politik dan ekonomi. Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, AU harus beralih ke peacebuilding, termasuk rekonsiliasi nasional, desentralisasi kekuasaan, keadilan transisi, serta pemulihan ekonomi pascakonflik. Selain dampak militer dan politik, perang proxy ini juga menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah akibat blokade ekonomi dan akses terbatas terhadap bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, solusi jangka panjang memerlukan tekanan diplomatik lebih kuat terhadap aktor eksternal serta reformasi struktural di Ethiopia agar distribusi kekuasaan lebih adil dan inklusif. Tanpa reformasi struktural dan komitmen internasional, konflik ini berisiko terus berulang dan mengancam stabilitas regional.

Kata kunci: Ethiopia-Tigray, Proxy War, Uni Afrika

PENDAHULUAN

Addis Ababa adalah ibu kota negara Federasi Ethiopia, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Federal Ethiopia. Negara ini terdiri dari sembilan wilayah, yaitu Afar, Tigray, Oromia, Somali, Gambela, Benishangul-Gumuz, Harari, Dire Dawa, dan Addis Ababa. Sebagai salah satu negara terbesar di Afrika, Ethiopia memiliki keberagaman etnis dan budaya yang luas. Kelompok etnis terbesar di Ethiopia meliputi Oromo, Amhara, dan Tigre.¹

Konflik Ethiopia-Tigray bermula dari ketidakstabilan politik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Front Demokratik Rakyat Ethiopia (EPRDF) memerintah selama hampir tiga puluh tahun dengan sistem pemerintahan yang dianggap korup dan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Sejak tahun 1994, Ethiopia menerapkan sistem federal di mana berbagai kelompok etnis mengendalikan sepuluh wilayah. Sistem ini dirancang oleh Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), yang sebelumnya menjadi partai dominan di Ethiopia. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintahan yang otoriter dan berbagai ketidakpuasan politik mengarah pada meningkatnya ketegangan antara TPLF dan pemerintah pusat Ethiopia.²

Ketika Abiy Ahmed menjadi Perdana Menteri pada 2018, ia melakukan reformasi politik yang mengurangi dominasi TPLF dalam pemerintahan. Ketegangan ini memuncak pada November 2020, ketika konflik bersenjata antara pemerintah Ethiopia dan TPLF pecah. Krisis ini diperburuk oleh berbagai faktor, termasuk kekerasan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembersihan etnis.³ Selain itu, keterlibatan aktor eksternal seperti Eritrea, yang mendukung pemerintah Ethiopia, menambah dimensi geopolitik pada konflik ini. Eritrea memberikan intervensi militer langsung serta dukungan logistik dan intelijen kepada Ethiopia, dengan tujuan melemahkan TPLF yang telah menjadi musuh politiknya sejak perang perbatasan pada akhir 1990-an.

Konflik ini telah berkembang menjadi perang perwakilan (proxy war), di mana aktor eksternal seperti Uni Emirat Arab, Turki, dan Iran turut memberikan dukungan militer kepada pihak-pihak yang bertikai. Keterlibatan ini tidak hanya memperpanjang durasi konflik tetapi juga menghambat upaya mediasi oleh Uni

¹ D. T. Wijayanti dan S. N. Aini, "Uni Afrika: Membangun Jembatan Perdamaian dalam Konflik Pemerintah Ethiopia dan Tigray," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 5, no. 2 (2023): 82–89.

² A. J. Iswara, "Konflik Etiopia-Tigray: Apa Pemicunya dan Apa yang Sedang Terjadi?" *Kompas.com*, November 20, 2020, <https://www.kompas.com/global/read/2020/11/20/211211470/konflik-etioopia-tigray-apa-pemicunya-dan-apa-yang-sedang-terjadi>.

³ B. Pragilaksono, "Konflik Berkepanjangan Ethiopia: Sebuah Penghampiran Mediasi Ethiopia-Tigray," *Jurnal Sentris* 3, no. 1 (2022): 16–26.

Afrika (AU). Sebagai organisasi regional yang bertujuan menjaga stabilitas di Afrika, AU menghadapi tantangan besar dalam menangani konflik ini, terutama karena mediasi yang dilakukan masih berfokus pada *peacekeeping*, yaitu penghentian kekerasan tanpa menyentuh akar penyebab konflik seperti ketimpangan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran aktor eksternal dalam konflik Ethiopia-Tigray, mengevaluasi keterlibatan Uni Afrika dalam mediasi konflik, serta mengkaji dampak perang proxy terhadap dinamika konflik dan stabilitas kawasan Tanduk Afrika.

Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan tantangan dalam penyelesaian konflik yang disebabkan oleh keterlibatan aktor eksternal serta membahas strategi resolusi yang dapat diterapkan untuk mencapai perdamaian yang lebih stabil dan berkelanjutan. Mengingat kompleksitas konflik ini, penelitian ini juga akan membahas bagaimana faktor ekonomi, sosial, dan diplomatik turut berperan dalam memperpanjang atau menyelesaikan konflik Ethiopia-Tigray. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek militer dan politik, tetapi juga pada dimensi yang lebih luas, termasuk aspek kemanusiaan dan dampaknya terhadap masyarakat sipil.

Penelitian sebelumnya telah membahas konflik Ethiopia-Tigray dari perspektif sejarah, politik domestik, dan hak asasi manusia (Pragilaksono, 2022; Iswara, 2020). Namun, penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih spesifik dengan menyoroti peran Uni Afrika dalam penyelesaian konflik serta bagaimana keterlibatan aktor eksternal mempersulit proses tersebut. Fokus ini memberikan wawasan baru dalam memahami tantangan diplomatik yang dihadapi organisasi regional dalam menangani perang proxy.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengkaji bagaimana keterlibatan aktor eksternal dalam konflik Ethiopia-Tigray berdampak pada efektivitas peran Uni Afrika dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya transisi dari *peacekeeping* ke *peacebuilding* agar tercipta perdamaian yang berkelanjutan. Strategi *peacebuilding* mencakup rekonsiliasi nasional, desentralisasi kekuasaan, keadilan transisi, serta pemulihan ekonomi pascakonflik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi Uni Afrika dalam mengadopsi strategi yang lebih komprehensif untuk mencapai solusi jangka panjang di Ethiopia. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika konflik, penelitian ini menegaskan bahwa tanpa reformasi struktural dan tekanan diplomatik yang lebih

kuat terhadap aktor eksternal, konflik ini berisiko terus berulang dan mengancam stabilitas regional.

Dalam menganalisis konflik Ethiopia-Tigray, teori hubungan internasional dan resolusi konflik menjadi kerangka utama. Teori Realisme menekankan bahwa dinamika konflik ini dipengaruhi oleh kepentingan negara dan aktor eksternal yang berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruhnya di kawasan. Menurut Waltz (1979), negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya dan menggunakan kekuatan untuk mengamankan posisinya dalam sistem internasional. Hal ini relevan dalam konflik Ethiopia-Tigray, di mana keterlibatan aktor eksternal seperti Eritrea, Uni Emirat Arab, Turki, dan Iran dapat dilihat sebagai bentuk perebutan pengaruh di kawasan Tanduk Afrika.

Selain itu, Teori Perang Proxy menjelaskan bagaimana konflik di Ethiopia tidak hanya merupakan pertikaian domestik, tetapi juga menjadi medan bagi kepentingan negara lain. Menurut Mumford (2013), perang proxy terjadi ketika negara atau kelompok eksternal mendukung pihak yang bertikai untuk mencapai kepentingan strategisnya tanpa terlibat secara langsung dalam pertempuran. Dalam konteks ini, dukungan militer dan finansial dari berbagai aktor eksternal kepada Ethiopia maupun TPLF memperpanjang konflik dan menghambat proses perdamaian.

Dari perspektif resolusi konflik, Teori Peacekeeping dan Peacebuilding yang dikemukakan oleh Doyle dan Sambanis⁴, menunjukkan bahwa intervensi organisasi internasional, seperti Uni Afrika, harus lebih dari sekadar penghentian kekerasan (peacekeeping), tetapi juga mencakup rekonsiliasi politik, keadilan transisi, dan pembangunan ekonomi pascakonflik (peacebuilding). Namun, keterbatasan mandat dan lemahnya kapasitas Uni Afrika dalam menangani perang proxy menjadi tantangan utama dalam proses penyelesaian konflik ini.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji konflik Ethiopia-Tigray dalam konteks *proxy war* serta keterlibatan aktor eksternal, khususnya Eritrea, dalam dinamika konflik tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai jurnal ilmiah,

⁴ Michael W. Doyle dan Nicholas Sambanis, "International Peacebuilding: A Theoretical and Quantitative Analysis," *American Political Science Review* 94, no. 4 (2000): 779–801.

⁵ Paul D. Williams, "African Union Peace Operations: Patterns, Problems, and Prospects," *African Affairs* 120, no. 479 (2021): 241–265.

laporan organisasi internasional, serta publikasi resmi yang membahas konflik Ethiopia-Tigray, peran Eritrea, dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Uni Afrika.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (literature review), dengan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan terkait sejarah konflik, intervensi aktor eksternal, serta kebijakan Uni Afrika dalam menangani krisis di kawasan tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan geopolitik dan teori *proxy war* untuk memahami bagaimana keterlibatan pihak luar memengaruhi eskalasi konflik serta efektivitas resolusi yang ditawarkan oleh Uni Afrika.

Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pola intervensi aktor eksternal dalam konflik Ethiopia-Tigray dan menilai dampaknya terhadap upaya penyelesaian konflik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik serta kontribusi terhadap perumusan kebijakan dalam resolusi konflik di kawasan Afrika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Aktor Eksternal dalam Konflik Ethiopia-Tigray

Eritrea telah menjadi aktor eksternal paling penting dalam konflik Ethiopia-Tigray karena mendukung pemerintah Ethiopia dalam menghadapi Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Sejak konflik berakhir pada November 2020, Eritrea mengirim ribuan pasukan ke Tigray untuk membantu militer Ethiopia mengatasi perlawanan TPLF. Pemerintah Eritrea memandang TPLF sebagai ancaman besar bagi stabilitas negaranya karena TPLF memiliki sejarah konflik panjang dengan Eritrea, terutama dalam hal konflik dadakan.

Pada awalnya, Eritrea dan Ethiopia berdebat langsung dalam konflik. Namun, pada April 2021, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengakui keterlibatan pasukan Eritrea dalam konflik. Untuk melindungi kepentingannya sendiri, seperti menguasai wilayah perbatasan dan mencegah TPLF mengambil alih kekuasaan politik dan militer Ethiopia, Eritrea menggunakan pendekatan agresif dan strategis ofensif.⁶ Sebagai musuh lama TPLF, Eritrea memanfaatkan konflik Tigray ini untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Tujuan keterlibatan Eritrea dalam konflik ini adalah untuk mengakhiri isolasi internasionalnya dan menjadi negara yang lebih unggul di Tanduk Afrika. Konflik ini juga dapat bermanfaat. Eritrea menunjukkan kekuatan dalam urusan internal Ethiopia dan memiliki kesempatan untuk

⁶ N. F. A. Muhammad, G. H. Putri, D. F. Aulia, dan S. G. Prakoso, "Unraveling the Political Motives of Eritrea in the Tigray Conflict," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 13, no. 1 (2024): 19–30.

membalas dendam terhadap TPLF. Selain itu, Eritrea berusaha memanfaatkan kekuatannya dengan terlibat dalam konflik di negara lain. PBB telah menjatuhkan sanksi terhadap Eritrea sejak tahun 2009 karena keterlibatannya dalam konflik di Somalia, menjadikan negara itu menjadi negara paria. Eritrea kurang berpengaruh di wilayah tersebut karena isolasi internasionalnya dibandingkan dengan TPLF Ethiopia.

Keterlibatan Eritrea dalam konflik Tigray juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengaruhnya dalam urusan dalam negeri Ethiopia. Pasalnya, Eritrea memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi militer di wilayah yang dikuasai TPLF dan melakukan berbagai tindakan untuk mengalahkan TPLF, seperti yang disebutkan di atas, diakui oleh otoritas resmi Ethiopia. Ini juga memberi Eritrea kesempatan untuk membalas dendam kepada pasukan TPLF, yang telah lama menjadi musuh mereka.⁷

Uni Emirat Arab (UEA) juga diduga sebagai salah satu aktor eksternal dalam konflik ini, terutama melalui bantuan teknologi militer. Menurut Al Jazeera telah melaporkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah membuka jembatan udara untuk menawarkan dukungan militer yang luas kepada pemerintah Ethiopia dalam perang mereka melawan pasukan dari wilayah Tigray utara.⁸ Investigasi menemukan bahwa antara bulan September dan November terjadi lebih dari sembilan puluh penerbangan antara Uni Emirat Arab dan Ethiopia banyak yang sengaja menyembunyikan titik-titik lepas pantai dan daratan, bahwa UEA memberikan dukungan berupa drone bersenjata kepada pemerintah Ethiopia untuk digunakan dalam serangan udara terhadap pasukan TPLF.

Keterlibatan UEA ini sejalan dengan kepentingan strategisnya di kawasan Tanduk Afrika, di mana negara ini memiliki pangkalan militer di Eritrea dan investasi besar dalam infrastruktur serta pelabuhan di wilayah tersebut. Penggunaan drone bersenjata secara signifikan meningkatkan efektivitas serangan udara Ethiopia terhadap posisi TPLF, memperburuk eskalasi konflik dan meningkatkan jumlah korban sipil.

Selain Eritrea dan UEA, Turki dan Iran juga diduga memiliki peran dalam memasok senjata ke berbagai pihak yang terlibat dalam konflik Ethiopia-Tigray. Keterlibatan Turki dan Iran menunjukkan bagaimana persaingan geopolitik global

⁷ ibid

⁸ Al Jazeera, "UAE Air Bridge Provides Military Support to Ethiopia Govt," November 25, 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/25/uae-air-bridge-provides-military-support-to-ethiopia-govt>.

mempengaruhi konflik internal Ethiopia, dengan berbagai negara luar mendukung pihak yang berbeda untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut.⁹

Upaya Uni Afrika terhadap konflik Ethiopia-Tigray

Di tengah meningkatnya eskalasi konflik, organisasi internasional Uni Afrika berupaya menengahi dan mencari solusi damai. Uni Afrika memainkan peran penting dalam menengahi konflik di Ethiopia-Tigray dengan menyerukan penghentian kekerasan dan solusi damai. Organisasi ini mengekspresikan keprihatinan atas memburuknya situasi kemanusiaan dan menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia serta melindungi warga sipil. AU menyerukan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah Ethiopia dan Pasukan Pemberontak Tigray, untuk menahan diri dari tindakan yang memperburuk konflik dan lebih mengutamakan dialog.¹⁰ Pernyataan resmi yang dikeluarkan AU bertujuan untuk memberikan tekanan politik guna menghentikan pertempuran dan mencari jalan keluar yang damai.

Sebagai mediator, AU menghadapi tantangan dalam mempertemukan kedua belah pihak yang bersikeras mempertahankan posisi masing-masing. Proses perundingan yang berlangsung di Pretoria, Afrika Selatan, memperlihatkan upaya AU dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah Ethiopia dan pasukan Tigray. AU mengutus tiga tokoh penting, yaitu mantan presiden Mozambik, Joaquim Chissano, mantan presiden Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, dan mantan presiden Afrika Selatan, Kgalema Motlanthe. Tugas utama mereka adalah membangun kondisi yang memungkinkan adanya dialog inklusif yang dapat mengarah pada perdamaian yang berkelanjutan.¹¹

Meskipun AU berupaya memfasilitasi negosiasi, pemerintah Ethiopia berulang kali menolak berunding dengan TPLF, partai politik yang memimpin pemberontakan di Tigray. Strategi AU dalam menangani konflik ini mencerminkan tujuan organisasi dalam menjaga stabilitas regional dan melibatkan tokoh-tokoh Afrika dalam penyelesaian sengketa. Langkah-langkah yang diambil AU selaras dengan prinsip hukum dan normatif organisasi dalam penyelesaian konflik, meskipun efektivitasnya selalu menghadapi tantangan dari kepentingan politik domestik Ethiopia serta dinamika geopolitik yang lebih luas. Namun, keterbatasan

⁹ M. T. Gebrewahd, "The War on Tigray: Geopolitics and the Struggle for Self-Determination," *Hungarian Journal of African Studies* 17 (2023): 5.

¹⁰ D. T. Wijayanti dan S. N. Aini, "Uni Afrika: Membangun Jembatan Perdamaian dalam Konflik Pemerintah Ethiopia dan Tigray," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 5, no. 2 (2023): 82–89.

¹¹ *ibid*

ini juga menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan AU masih lebih cenderung pada peacekeeping daripada peacebuilding.

Pendekatan manajemen konflik yang diterapkan oleh Uni Afrika dalam konflik Ethiopia-Tigray dapat dilihat melalui konsep perdamaian negatif (-P) dan perdamaian positif (+P) yang dikembangkan oleh Johan Galtung. Hingga saat ini, strategi AU masih berada dalam tahap perdamaian negatif, di mana upaya yang dilakukan hanya berfokus pada penghentian kekerasan langsung melalui mediasi, diplomasi, dan gencatan senjata tanpa menyentuh akar penyebab konflik. Hal ini dapat terlihat dalam negosiasi yang dimediasi AU di Pretoria, yang memang menghasilkan kesepakatan damai, tetapi belum menciptakan solusi jangka panjang terhadap ketimpangan struktural yang menjadi pemicu utama konflik. Meskipun peacekeeping yang dilakukan AU berhasil mengontrol eskalasi kekerasan, strategi ini masih belum cukup untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan karena belum menangani permasalahan mendasar seperti marginalisasi politik dan ekonomi masyarakat Tigray.

Oleh karena itu, untuk menciptakan resolusi yang lebih efektif, Uni Afrika perlu mengembangkan strategi konflik dari peacekeeping menuju peacebuilding. Dimana Peacebuilding berfokus pada rekonsiliasi nasional, reformasi politik yang lebih inklusif, pemberdayaan masyarakat pascakonflik, serta distribusi kekuasaan yang lebih merata. Dalam konteks Ethiopia-Tigray, penerapan peacebuilding harus mencakup mekanisme keadilan transisi untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia selama perang, serta pemulihan ekonomi bagi wilayah-wilayah terdampak konflik. Namun, tantangan utama bagi AU adalah memastikan bahwa solusi ini benar-benar diimplementasikan. Tanpa adanya mekanisme pemantauan yang kuat serta tekanan politik yang konsisten terhadap pihak yang bertikai, terdapat risiko bahwa perdamaian hanya akan bersifat sementara dan konflik dapat kembali muncul.

Hal ini dapat dilakukan dengan menekankan desentralisasi kekuasaan, peningkatan akses masyarakat Tigray terhadap pemerintahan, serta penguatan dialog antar-etnis untuk mencegah ketegangan lebih lanjut. Dengan demikian, strategi manajemen konflik yang diterapkan AU harus berkembang dari sekadar menjaga perdamaian menjadi membangun fondasi perdamaian yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Dampak Proxy War terhadap Konflik Ethiopia-Tigray

Meskipun Uni Afrika telah berupaya menangani konflik Ethiopia-Tigray. Salah satu faktor utama yang menghambat penyelesaian konflik adalah keterlibatan aktor eksternal dalam perang proxy, yang memperburuk eskalasi kekerasan dan memperpanjang ketegangan di kawasan. Intervensi negara-negara seperti Eritrea, UEA, Turki, dan Iran tidak hanya meningkatkan kapasitas militer pihak yang bertikai, tetapi juga semakin menyulitkan upaya mediasi dan perdamaian yang dilakukan AU.

Konflik Ethiopia-Tigray telah berkembang menjadi perang proxy yang memperburuk situasi keamanan di kawasan Tanduk Afrika. Keterlibatan aktor eksternal seperti Eritrea, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, dan Iran tidak hanya meningkatkan intensitas pertempuran tetapi juga memperpanjang durasi konflik. Menurut Bapat (2012), perang proxy cenderung memperpanjang konflik internal karena pihak eksternal memberikan dukungan militer yang membuat masing-masing pihak yang bertikai semakin kuat dan sulit dikalahkan.¹²

Dalam kasus Ethiopia-Tigray, UEA dan Turki dilaporkan memasok drone bersenjata kepada pemerintah Ethiopia untuk memperkuat serangan udara terhadap TPLF, sementara Iran diduga memberikan dukungan teknologi militer. Dukungan UEA terhadap Ethiopia tidak hanya didasarkan pada aliansi politik, tetapi juga pada kepentingan ekonomi dan geopolitik di Tanduk Afrika. Ethiopia adalah mitra strategis UEA di kawasan ini, terutama dalam pengelolaan jalur perdagangan dan investasi infrastruktur. Dengan adanya intervensi ini, konflik yang seharusnya dapat segera diselesaikan justru semakin berlarut-larut.¹³

Selain memperpanjang perang, konflik ini juga menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, terutama di wilayah Tigray. Human Rights Watch (2023) melaporkan bahwa pasukan Eritrea dan militer Ethiopia telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembantaian warga sipil, pemerkosaan massal, dan penyiksaan.¹⁴ Selain itu, pemerintah Ethiopia juga memberlakukan blokade terhadap Tigray, yang menyebabkan kelangkaan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.¹⁵ Penyelidikan yang diamanatkan PBB melalui

¹² N. A. Bapat, "Memahami Dukungan Negara terhadap Kelompok Militeran," *British Journal of Political Science* 42, no. 1 (2012): 1–29.

¹³ Al Jazeera, "UAE Air Bridge Provides Military Support to Ethiopia Govt," November 25, 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/25/uae-air-bridge-provides-military-support-to-ethiopia-govt>.

¹⁴ Human Rights Watch, "Ethiopia: Atrocities Mar Ceasefire Anniversary," November 2, 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/11/02/ethiopia-atrocities-mar-ceasefire-anniversary>.

¹⁵ Amnesty International, "Ethiopia: Crimes against Humanity in Western Tigray Zone," April 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/ethiopia-crimes-against-humanity-in-western-tigray-zone/>.

Komisi Internasional Ahli Hak Asasi Manusia untuk Ethiopia (ICHREE) baru-baru ini mengungkapkan tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi selama konflik berlangsung, dengan peringatan yang akan kemungkinan meningkatnya kejahatan lebih lanjut meskipun perjanjian penghentian kekerasan telah dibuat. Namun, upaya penyelidikan independen terhambat ketika anggota Dewan Hak Asasi Manusia gagal memperbarui mandat komisi, di tengah tekanan kuat dari pemerintah Ethiopia yang bahkan mengancam mengusulkan resolusi untuk mengakhiri mandat lebih awal.

Sementara otoritas Ethiopia telah mengadakan konsultasi publik mengenai keadilan transisi sejak Maret untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap akuntabilitas, upaya tersebut belum menghasilkan mekanisme resmi, dan masih sedikit pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka selama konflik.¹⁶ Dengan keterbatasan akses bagi organisasi kemanusiaan internasional yang ingin menyalurkan bantuan kepada penduduk yang terdampak. Akibatnya, jutaan orang mengalami kelaparan dan terpaksa mengungsi, menjadikan konflik ini sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di Afrika saat ini.

Dari perspektif politik dan geopolitik, perang proxy di Ethiopia telah mengganggu stabilitas regional dan memperumit diplomasi internasional. Eritrea, yang memainkan peran aktif dalam konflik ini, semakin mendapat tekanan dari komunitas internasional akibat keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, keterlibatan negara-negara seperti UEA, Turki, dan Iran mencerminkan persaingan geopolitik di Afrika Timur, di mana masing-masing negara berusaha memperluas pengaruhnya melalui dukungan militer terhadap pihak-pihak tertentu. Sementara itu, upaya mediasi oleh Uni Afrika (AU) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi tantangan besar karena kepentingan eksternal yang berseberangan dengan tujuan perdamaian.¹⁷ Secara keseluruhan, perang proxy dalam konflik Ethiopia-Tigray telah membawa dampak yang luas, baik dalam aspek militer, kemanusiaan, maupun geopolitik. Dukungan militer dari aktor eksternal memperpanjang durasi konflik dan meningkatkan korban sipil, sementara intervensi politik dari negara-negara asing semakin memperumit penyelesaian damai. Seperti yang dikatakan Bapat (2012), konflik yang dipengaruhi oleh aktor eksternal sering kali sulit untuk dihentikan karena adanya kepentingan strategis yang melampaui batas domestik. Oleh karena itu,

¹⁶ ibid

¹⁷ D. T. Wijayanti dan S. N. Aini, "Uni Afrika: Membangun Jembatan Perdamaian dalam Konflik Pemerintah Ethiopia dan Tigray," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 5, no. 2 (2023): 82–89.

solusi jangka panjang bagi konflik Ethiopia-Tigray harus melibatkan tekanan internasional yang lebih kuat terhadap aktor eksternal serta komitmen yang lebih besar dari pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan.¹⁸

KESIMPULAN

Konflik Ethiopia-Tigray telah berkembang menjadi perang yang diperburuk oleh aktor eksternal, menjadikannya bagian dari dinamika perang proxy yang kompleks. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Turki, dan Iran memperburuk keadaan dengan menyediakan senjata, dan Eritrea membantu Ethiopia menekan TPLF. Keterlibatan ini menyebabkan pertempuran menjadi lebih buruk dan menghambat upaya diplomasi dari komunitas internasional, termasuk Uni Afrika (AU). AU telah berusaha menjadi mediator, tetapi upayanya tidak efektif karena berfokus pada penegakan perdamaian daripada pembangunan perdamaian, sehingga tidak menangani akar masalah konflik. Selain itu, tidak mampu menekan pihak eksternal seperti Eritrea, membuat penyelesaian konflik secara menyeluruh semakin sulit. Dibutuhkan strategi pembangunan perdamaian yang lebih kuat, seperti rekonsiliasi nasional, desentralisasi kekuasaan, dan keadilan transisi, jika Uni Afrika ingin memainkan peran yang lebih besar.

Konflik ini memiliki dampak yang sangat luas, mencakup aspek militer, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Jutaan orang di Tigray kelaparan dan mengungsi karena krisis pangan yang semakin parah karena masalah ekonomi dan kekurangan pasokan bantuan kemanusiaan. Selain itu, ketidakstabilan di Ethiopia menghambat perdagangan dan investasi di Afrika. Akibatnya, untuk menyelesaikan konflik Ethiopia-Tigray dalam jangka panjang, perlu ada tekanan diplomatik yang lebih kuat terhadap pihak-pihak eksternal serta reformasi struktural di Ethiopia yang memungkinkan pembagian kekuasaan yang lebih adil dan inklusif. Konflik ini berisiko berulang dan semakin mengancam stabilitas kawasan jika tidak ada reformasi politik yang signifikan dan dukungan dari komunitas internasional.

¹⁸ N. A. Bapat, "Memahami Dukungan Negara terhadap Kelompok Militeran," *British Journal of Political Science* 42, no. 1 (2012): 1–29.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. "UAE Air Bridge Provides Military Support to Ethiopia Govt." November 25, 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/25/uae-air-bridge-provides-military-support-to-ethiopia-govt>.
- Amnesty International. "Ethiopia: Crimes against Humanity in Western Tigray Zone." April 2022. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/ethiopia-crimes-against-humanity-in-western-tigray-zone/>.
- Bapat, N. A. "Memahami Dukungan Negara terhadap Kelompok Militan." *British Journal of Political Science* 42, no. 1 (2012): 1–29.
- Doyle, Michael W., dan Nicholas Sambanis. "International Peacebuilding: A Theoretical and Quantitative Analysis." *American Political Science Review* 94, no. 4 (2000): 779–801.
- Gebrewahd, M. T. "The War on Tigray: Geopolitics and the Struggle for Self-Determination." *Hungarian Journal of African Studies* 17 (2023): 5.
- Human Rights Watch. "Ethiopia: Atrocities Mar Ceasefire Anniversary." November 2, 2023. <https://www.hrw.org/news/2023/11/02/ethiopia-atrocities-mar-ceasefire-anniversary>.
- Iswara, A. J. "Konflik Etiopia-Tigray: Apa Pemicunya dan Apa yang Sedang Terjadi?" *Kompas.com*, November 20, 2020. <https://www.kompas.com/global/read/2020/11/20/211211470/konflik-etio-pa-tigray-apa-pemicunya-dan-apa-yang-sedang-terjadi>.
- Muhammad, N. F. A., G. H. Putri, D. F. Aulia, dan S. G. Prakoso. "Unraveling the Political Motives of Eritrea in the Tigray Conflict." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 13, no. 1 (2024): 19–30.
- Pragilaksono, B. "Konflik Berkepanjangan Ethiopia: Sebuah Penghampiran Mediasi Ethiopia-Tigray." *Jurnal Sentris* 3, no. 1 (2022): 16–26.
- Wijayanti, D. T., dan S. N. Aini. "Uni Afrika: Membangun Jembatan Perdamaian dalam Konflik Pemerintah Ethiopia dan Tigray." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 5, no. 2 (2023): 82–89.
- Williams, Paul D. "African Union Peace Operations: Patterns, Problems, and Prospects." *African Affairs* 120, no. 479 (2021): 241–265.